



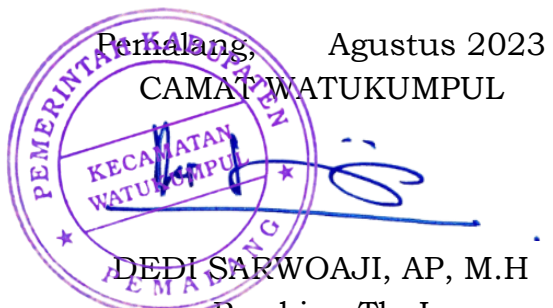
**RENCANA KERJA
(RENJA- PD)
KECAMATAN WATUKUMPUL
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WATUKUMPUL
TAHUN 2023**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Kecamatan Watukumpul Tahun 2024 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Watukumpul, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024.

Pemalang, Agustus 2023
CAMAT WATUKUMPUL



DEDI SARWOAJI, AP, M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19741206 199311 1 001


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang telah Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2024.

Rencana Kerja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2024 ini disamping sebagai dokumen rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dan program kegiatan Kecamatan Watukumpul sebagai perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Watukumpul.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja PD ini belum sempurna, sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan. Namun demikian kami berharap Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul Tahun 2024 dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Pemalang, Agustus 2023
CAMAT WATUKUMPUL

DEDI SARWOAJI, AP, M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19741206 199311 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|--------------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL..... | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | I-1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | I-1 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | I-3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | I-6 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | I-7 |
| | |
| BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KEC. WATUKUMPUL TAHUN 2022..... | II-1 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Watukumpul Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Watukumpul..... | II-1 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul..... | II-37 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Watukumpul | II-37 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKP..... | II-43 |
| 2.5 Penelaah Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat..... | II-57 |
| | |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN WATUKUMPUL..... | III-1 |
| 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional | III-1 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Watukumpul..... | III-1 |
| A. Tujuan..... | III-2 |
| B. Sasaran | III-2 |
| 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | III-3 |
| | |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KEC. WATUKUMPUL..... | IV-1 |
| | |
| BAB V PENUTUP | V-1 |
| 5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian | V-1 |
| 5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Tujuan..... | V-1 |
| 5.3 Rencana Tindak Lanjut | V-1 |
| | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Watukumpul dan Pencapaian Renstra Kecamatan Watukumpul s/d Tahun 2023..... | II-2 |
| Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec.Watukumpul | II-37 |
| Tabel 2.3 : Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab.Pemalang Tahun 2024..... | II-44 |
| Tabel 2.4 : Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat Tahun 2024..... | II-57 |
| Tabel 3.1 : Tujuan dan Sasaran Kec.Watukumpul Tahun 2024 | III-2 |
| Tabel 4.1 : Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kec.Watukumpul Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 | IV-4 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 1.1 : Bagan Alir Penyusunan Renja Kecamatan Watukumpul Tahun 2024..... | I-2 |
| Gambar 1.2 : Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya | I-3 |

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Watukumpul yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024. Renja Kecamatan Watukumpul merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Watukumpul yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kecamatan Watukumpul melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2024. Renja Kecamatan Watukumpul dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Renja Kecamatan Watukumpul mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja Kecamatan Watukumpul mengingat :

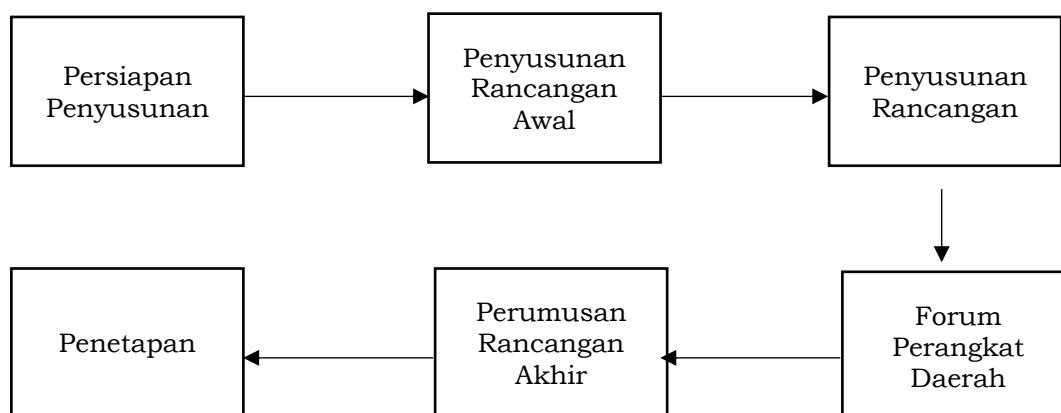
1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Kecamatan Watukumpul dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi acuan bagi Kecamatan Pemalang untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan pada Unsur Kewilayahan; dan

4. Secara faktual, merupakan salah satu instrumen evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Watukumpul dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2024
 - Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja tahun 2022, pengendalian kegiatan tahun 2022, dan RKPD tahun 2024)
2. Penyusunan rancangan awal
 - Koordinasi dengan Seksi-seksi
 - Desk dengan pengampu kegiatan
3. Penyusunan rancangan
 - Sinkronisasi oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2024
 - Masukan dari pelaksana kegiatan di Kecamatan Watukumpul
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 - Melaksanakan FGD dengan mengundang : Dinpermasdes, Bagian Tapem Sekretariat Daerah, Disdukcatpil, Bakesbangpol, Satpol PP, Pemerintah Desa, Akademisi, Organisasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan yang terkait
5. Perumusan rancangan akhir
 - Penyempurnaan oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2024
 - Diverifikasi oleh Bappeda
6. Penetapan
 - Bersama dengan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati

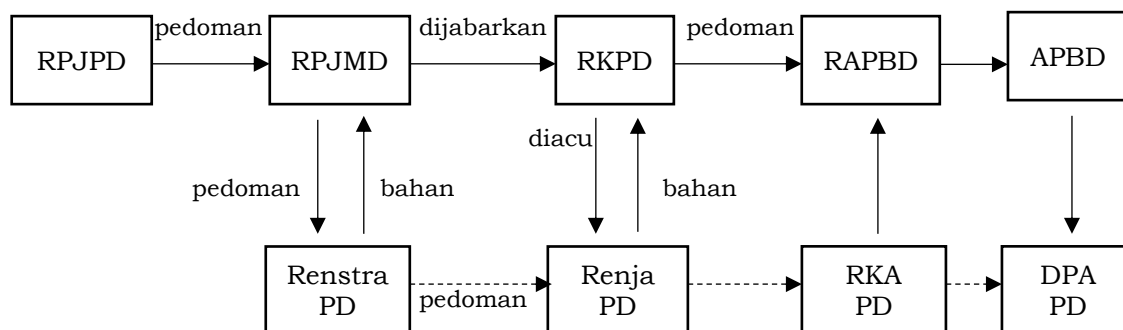
Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renja Kecamatan Watukumpul
Tahun 2024



Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2024 adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Watukumpul tahun 2021-2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang tahun 2024

serta mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025.

Gambar 1.2
Keterkaitan Renja PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Renja Kecamatan Watukumpul berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pemalang tahun 2024, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2024, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019

- tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang;
 34. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
 35. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
 36. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
 37. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
 38. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang;
 39. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 40. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pemalang;
 41. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Watukumpul adalah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada tahun 2024 berdasarkan penjabaran dari Renstra Kecamatan Watukumpul tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Watukumpul sebagai berikut:

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di Kecamatan Watukumpul;
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Watukumpul tahun 2024;

3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Watukumpul Tahun 2022, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 mengacu pada APBD Tahun 2023 , Pencapaian target Renstra Kecamatan Watukumpul, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Watukumpul, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Watukumpul, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program ,kegiatan dan Sub Kegiatan masyarakat.
3. Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Watukumpul, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Watukumpul, program, kegiatan dan sub kegiatan.
4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Watukumpul, berisi tentang rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Watukumpul beserta indikator.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Watukumpul.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN WATUKUMPUL
TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Watukumpul Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Watukumpul

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di Kecamatan Watukumpul pada tahun 2022 dan estimasi tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2022

Jumlah anggaran Kecamatan Watukumpul sebesar Rp. 2.830.039.000,- yang terbagi dalam 6 program, 14 kegiatan dan 45 sub kegiatan. Dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 2.640.652.784,- atau sebesar 93,31 %.

Tahun Anggaran 2023 (tahun berjalan)

Jumlah anggaran penetapan Kecamatan Watukumpul sebesar Rp. 2.517.421.000,- yang terbagi dalam 6 program, 12 kegiatan dan 40 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran yang sudah terealisasi sebesar Rp. 1.089.784.797,- atau sebesar 43,29 %.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2022, Kecamatan Watukumpul telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang secara umum realisasi capaiannya sebagian besar sangat tinggi namun masih ada program dan kegiatan yang capaian kinerjanya masih rendah hal ini dikarenakan dengan adanya pandemi Covid 19 membatasi kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dan juga membatasi rapat koordinasi ke luar daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2022 hingga triwulan IV, Kecamatan Watukumpul telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dengan hasil sebagai berikut.

1. Ada 6 Program, 14 Kegiatan dan 45 Sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Watukumpul yaitu tercapai di tahun 2022;

Berikut ini disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Watukumpul dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023 Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Watukumpul dan Pencapaian Renstra Kecamatan Watukumpul s/d Tahun 2023 Kabupaten Pemasang

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|--------------|---|--|----------------|---|--|---|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| '7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 107,66 | 28,1 | 35,82 | 39,53 | 110,36 | 36,32 | 103,95 | 96,55 |
| | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai | 105,9 | 41,63 | 35,30 | 48,4 | 137,11 | 35,8 | 125,83 | 118,82 |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | Keluaran Kegiatan | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Dokumen | 46 | 14 | 13 | 13 | 100 | 14 | 41 | 89,13 |
| | | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Dokumen | 46 | 15 | 13 | 13 | 100 | 14 | 41 | 89,13 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|---|---|----------------|---|--|---|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| | Hasil Kegiatan | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan | % | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 |
| | | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | % | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 |
| 7.01.01.2.0 1.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 7 | 3 | 2 | 2 | 100 | 2 | 7 | 100 |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 7 | 3 | 2 | 2 | 100 | 2 | 7 | 100 |
| 7.01.01.2.0 1.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun | Dokumen | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 100 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|--|---|----------------|---|---|--|--|--------------------------|---|---|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 100 |
| 7.01.01.2.0 1.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun | Dokumen | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 100 |
| | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 100 |
| 7.01.01.2.0 1.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD | Jumlah DPA SKPD yang disusun | Dokumen | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 100 |
| | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 100 |
| 7.01.01.2.0 1.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Jumlah perubahan DPA- SKPD yang disusun | Dokumen | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 100 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|--|---|----------------|---|---|--|--|--------------------------|---|---|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 100 |
| 7.01.01.2.0 1.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun | Dokumen | 18 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 12 | 66,67 |
| | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 18 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 12 | 66,67 |
| 7.01.01.2.0 1.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 9 | 3 | 3 | 3 | 100 | 4 | 10 | 111,11 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|--|--|-------------------------|---|---|--|--|--------------------------|---|---|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 9 | 3 | 3 | 3 | 100 | 4 | 10 | 111,11 |
| 7.01.01.2.0 1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | Keluaran Kegiatan | Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun | Dokumen | 16 | 3 | 2 | 2 | 100 | 2 | 7 | 43,75 |
| | | Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun | Laporan | 16 | 3 | 2 | 2 | 100 | 2 | 7 | 43,75 |
| | Hasil Kegiatan | Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel | % | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 |
| | | Persentase jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun | % | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 |
| 7.01.01.2.0 2.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang tersedia gaji dan tunjangan | Orang/ bulan | 17/42 | 16/14 | 17/14 | 17/14 | 100 | 14/14 | 17/42 | 100 |
| | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/ bulan | 17/42 | 16/14 | 17/14 | 17/14 | 100 | 14/14 | 17/42 | 100 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|--|--|----------------|---|---|--|--|--------------------------|---|---|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| 7.01.01.2.0 2.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun | Dokumen | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 100 |
| | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 100 |
| 7.01.01.2.0 2.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/se mesteran SKPD yang disusun | Dokumen | 12 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 8,33 |
| | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Laporan | 12 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 8,33 |
| 7.01.01.2.0 6 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|--|---|-----------------|---|---|--|--|--------------------------|---|---|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| | Keluaran Kegiatan | Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia | Layanan | 24 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 12 | 50 |
| | | Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun | Dokumen | 197 | 116 | 66 | 66 | 100 | 67 | 249 | 126,40 |
| | Hasil Kegiatan | Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas | % | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 |
| | | Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun | % | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 |
| 7.01.01.2.0 6.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Jenis/ bulan | 4/36 | 4/12 | 3/12 | 3/12 | 100 | 4/12 | 4/36 | 100 |
| | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 4 | 3 | 3 | 100 | 4 | 11 | 91,67 |
| 7.01.01.2.0 6.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jenis bahan logistik kantor yang disediakan | Jenis/ bulan | 25/36 | 2/12 | 25/12 | 25/12 | 100 | 25/12 | 25/36 | 100 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|--|--|----------------|---|---|--|--|--------------------------|---|---|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 75 | 2 | 25 | 25 | 100 | 25 | 52 | 69,33 |
| 7.01.01.2.0 6.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jenis barang cetakan yang disediakan | Jenis/ bulan | 2/36 | 2/12 | 2/12 | 2/12 | 100 | 2/12 | 2/36 | 100 |
| | | Jumlah penggandaan yang disediakan | Lembar | 16000 | 2000 | 1806 | 1806 | 100 | 1806 | 5612 | 35,08 |
| | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 9 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 66,67 |
| 7.01.01.2.0 6.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti | Kegiatan | 101 | 108 | 36 | 36 | 100 | 36 | 180 | 178,22 |
| | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 101 | 108 | 36 | 36 | 100 | 36 | 180 | 178,22 |
| 7.01.01.2.0 7 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | |
| | Keluaran Kegiatan | Jumlah barang milik daerah yang tersedia | Unit | 17 | 6 | 6 | 6 | 100 | 0 | 12 | 70,59 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|---|---|-------------|---|--|---|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| | | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia | Unit | 17 | 6 | 6 | 6 | 100 | 0 | 12 | 70,59 |
| | Hasil Kegiatan | Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas | % | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 |
| | | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang tersedia | % | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 |
| 7.01.01.2.0 7.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah mebel yang tersedia | Unit | 5 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 4 | 80 |
| | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 5 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 4 | 80 |
| 7.01.01.2.0 7.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia | Unit | 12 | 2 | 6 | 6 | 100 | 0 | 8 | 66,67 |
| | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 12 | 2 | 6 | 6 | 100 | 0 | 8 | 66,67 |
| 7.01.01.2.0 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|---|---|----------------|---|--|---|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| | Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | |
| | Keluaran Kegiatan | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia | Jasa | 12 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 12 | 100 |
| | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun | Laporan | 216 | 36 | 48 | 48 | 100 | 72 | 156 | 72,22 |
| | Hasil Kegiatan | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas | % | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 |
| | | Persentase jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun | % | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 |
| 7.01.01.2.0 8.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat dinas yang terkirim | Surat | 2400 | 800 | 800 | 800 | 100 | 800 | 2400 | 100 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|--|---|-----------------|---|---|--|--|--------------------------|---|---|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 36 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 36 | 100 |
| 7.01.01.2.0 8.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening jasa komunikasi, SDA dan listrik yang dibayar tiap bulan | Jenis/ bulan | 3/36 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 100 | 3/12 | 3/36 | 100 |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 108 | 12 | 12 | 12 | 100 | 36 | 60 | 55,56 |
| 7.01.01.2.0 8.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar | Jenis/ bulan | 3/36 | 0 | 17/12 | 17/12 | 100 | 3/12 | 3/24 | 66,67 |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 36 | 0 | 12 | 12 | 100 | 12 | 24 | 66,67 |
| 7.01.01.2.0 8.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan | Orang/ bulan | 9/36 | 9/12 | 9/12 | 9/12 | 100 | 10/12 | 10/36 | 100 |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 36 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 36 | 100 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|-----------------|--|--|-------------|---|--|---|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | |
| | Keluaran Kegiatan | Jumlah barang milik daerah yang terpelihara | Unit | 76 | 33 | 22 | 22 | 100 | 22 | 77 | 101,32 |
| | | Jumlah barang milik daerah yang terpelihara | Unit | 76 | 33 | 22 | 22 | 100 | 22 | 77 | 101,32 |
| | Hasil Kegiatan | Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas | % | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 |
| | | Persentase barang milik daerah yang terpelihara | % | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 |
| 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang berijin dan terpelihara | Unit | 51 | 16 | 16 | 16 | 100 | 16 | 48 | 94,12 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|--|---|-------------|---|---|--|--|--------------------------|---|---|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 51 | 16 | 16 | 16 | 100 | 16 | 48 | 94,12 |
| 7.01.01.2.0 9.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | Unit | 9 | 13 | 3 | 3 | 100 | 3 | 19 | 211,11 |
| | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 9 | 13 | 3 | 3 | 100 | 3 | 19 | 211,11 |
| 7.01.01.2.0 9.09 | Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara | Unit | 7 | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 | 9 | 128,57 |
| | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi | Unit | 7 | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 | 9 | 128,57 |
| 7.01.01.2.0 9.11 | Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara | Unit | 9 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 11,11 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|------------------|--|---|----------------|---|---|--|--|--------------------------|---|---|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 9 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 11,11 |
| 7.01.02 | Program Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase Pelayanan Publik yang tersedia | % | 279,99 | 93,33 | 93,33 | 93,33 | 100,00 | 93,33 | 279,99 | 100,00 |
| 7.01.02.2.0 1 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | |
| | Keluaran Kegiatan | Jenis data pemerintahan yang dipublikasikan | Data | 15 | 0 | 5 | 5 | 100 | 5 | 10 | 66,67 |
| | | Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun | Dokumen | 15 | 0 | 5 | 5 | 100 | 5 | 10 | 66,67 |
| | Hasil Kegiatan | Persentase data pemerintahan yang dipublikasi | % | 290 | 95 | 100 | 100 | 100 | 95 | 290 | 100 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|--|---|----------------|---|--|---|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| | | Persentase dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun | % | 290 | 95 | 100 | 100 | 100 | 95 | 290 | 100 |
| 7.01.02.2.0 1.02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jenis data pemerintahan yang tersedia | Data | 15 | 0 | 5 | 5 | 100 | 5 | 10 | 66,67 |
| | | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 15 | 0 | 5 | 5 | 100 | 5 | 10 | 66,67 |
| 7.01.02.2.0 2 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | | | | | | | | | |
| | Keluaran Kegiatan | Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani | Kasus | 15 | 0 | 5 | 5 | 100 | 5 | 10 | 66,67 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|---|--|----------------|---|--|---|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| | | Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun | Dokumen | 63 | 0 | 21 | 21 | 100 | 21 | 42 | 66,67 |
| | Hasil Kegiatan | Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan | % | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 |
| | | Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun | % | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 |
| 7.01.02.2.0 2.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah SOP pelayanan yang tersusun | Peraturan | 30 | 0 | 10 | 10 | 100 | 10 | 20 | 66,67 |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Dokumen | 30 | 0 | 10 | 10 | 100 | 10 | 20 | 66,67 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|--|--|----------------|---|--|---|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| 7.01.02.2.0 2.02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jenis pelayanan SPM yang terfasilitasi | Layanan | 18 | 0 | 6 | 6 | 100 | 6 | 12 | 66,67 |
| | | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 18 | 0 | 6 | 6 | 100 | 6 | 12 | 66,67 |
| 7.01.02.2.0 2.03 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani | Kasus | 15 | 0 | 5 | 5 | 100 | 5 | 10 | 66,67 |
| | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 15 | 0 | 5 | 5 | 100 | 5 | 10 | 66,67 |
| 7.01.02.2.0 4 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|---|---|----------------|---|--|---|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| | Keluaran Kegiatan | Jumlah pelayanan berdasar limpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia | Kewenangan | 21 | 7 | 7 | 7 | 100 | 7 | 21 | 100 |
| | | Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun | Dokumen | 345 | 215 | 115 | 115 | 100 | 115 | 430 | 124,64 |
| | Hasil Kegiatan | Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia | % | 225 | 75 | 75 | 75 | 100 | 75 | 225 | 100 |
| | | Persentase dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang tersusun | % | 225 | 75 | 75 | 75 | 100 | 75 | 225 | 100 |
| 7.01.02.2.0 4.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah izin non usaha yang diterbitkan | Izin | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 133,33 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|--|--|----------------|---|---|--|--|--------------------------|---|---|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| | | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Dokumen | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 133,33 |
| 7.01.02.2.0 4.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah laporan verwal DTKS yang tersusun | Dokumen | 30 | 15 | 15 | 15 | 100 | 0 | 30 | 100 |
| | | Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan | Surat | 60 | 0 | 20 | 20 | 100 | 0 | 20 | 33,33 |
| | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | Laporan | 45 | 15 | 15 | 15 | 100 | 0 | 30 | 66,67 |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif | % | 300 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 | 300 | 100,00 |
| 7.01.03.2.0 1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | | | | |
| | Keluaran Kegiatan | Jumlah peserta musyawarah perencanaan pembangunan | Orang | 300 | 75 | 75 | 75 | 100 | 75 | 225 | 75 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|---|---|--|---|---|--|--|--------------------------|---|---|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| | | Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun | Dokumen | 19 | 17 | 7 | 7 | 100 | 6 | 30 | 157,89 |
| | Hasil Kegiatan | Persentase kehadiran musyawarah pembangunan (Desa/ Kel+Kec) | % | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 |
| | | Persentase dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun | % | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 |
| 7.01.03.2.0 1.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah peserta sosialisasi Musrenbang Desa/Kelurahan | Orang | 75 | 15 | 25 | 25 | 100 | 0 | 40 | 53,33 |
| | | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Lembaga kemasyar akatan | 45 | 15 | 15 | 15 | 100 | 0 | 30 | 66,67 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|--|--|--------------------|---|---|--|--|--------------------------|---|---|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| 7.01.03.2.0 1.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan | Orang | 225 | 75 | 75 | 75 | 100 | 75 | 225 | 100 |
| | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 100 |
| 7.01.03.2.0 1.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah kegiatan hasil Musrenbang kab yang didampingi | Desa/ kelurahan | 45 | 15 | 3 | 3 | 100 | 15 | 33 | 73,33 |
| | | Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi | Lembaga | 15 | 0 | 5 | 5 | 100 | 5 | 10 | 66,67 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|------------------|--|---|----------------|---|---|--|--|--------------------------|---|---|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| | | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 15 | 15 | 5 | 5 | 100 | 5 | 25 | 166,67 |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan | % | 300 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 | 300 | 100,00 |
| 7.01.04.2.0 1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | |
| | Keluaran Kegiatan | Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya | Orang | 180 | 0 | 60 | 60 | 100 | 0 | 60 | 33,33 |
| | | Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun | Laporan | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 33,33 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|---|---|----------------|---|--|---|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| | Hasil Kegiatan | Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya | % | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 |
| | | Persentase laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun | % | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 |
| 7.01.04.2.0 1.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah peserta pelatihan Linmas | Orang | 180 | 0 | 60 | 60 | 100 | 0 | 60 | 33,33 |
| | | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 33,33 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|------------------|--|---|----------------|---|---|--|--|--------------------------|---|---|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| 7.01.04.2.0 2 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | |
| | Keluaran Kegiatan | Jumlah Perda dan Perkada yang dikoordinasikan penegakkannya | Peraturan | 30 | 0 | 10 | 10 | 100 | 2 | 12 | 40 |
| | | Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun | Laporan | 6 | 0 | 10 | 10 | 100 | 2 | 12 | 200 |
| | Hasil Kegiatan | Persentase Perda dan Perkada yang dikoordinasikan penegakkannya | % | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 |
| | | Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun | % | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|---|---|----------------|---|--|---|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| 7.01.04.2.0 2.01 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan | Jumlah Perda dan Perub yang dimonitoring | Peraturan | 30 | 0 | 10 | 10 | 100 | 2 | 12 | 40 |
| | | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Laporan | 6 | 0 | 10 | 10 | 100 | 2 | 12 | 200 |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani | % | 300 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 | 300 | 100,00 |
| 7.01.05.2.0 1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|------|--|---|----------------|---|---|--|--|--------------------------|---|---|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| | Keluaran Kegiatan | Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | Orang | 60 | 0 | 30 | 30 | 100 | 30 | 60 | 100 |
| | | Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun | Dokumen | 16 | 16 | 4 | 4 | 100 | 4 | 24 | 150 |
| | Hasil Kegiatan | Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | % | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 |
| | | Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun | % | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|---|--|---------|---|---|--|--|--------------------------|---|---|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| 7.01.05.2.0 1.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besor Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besor Agama, Festival Budaya yang dilaksanakan | Dokumen | 9 | 2 | 3 | 3 | 100 | 3 | 8 | 88,89 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|---|--|--------------|---|---|--|--|--------------------------|---|---|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 90 | 30 | 30 | 30 | 100 | 30 | 90 | 100 |
| 7.01.05.2.0 1.02 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa | Orang | 90 | 0 | 30 | 30 | 100 | 30 | 60 | 66,67 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|--|---|----------------|---|---|--|--|--------------------------|---|---|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| | | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Orang | 90 | 0 | 30 | 30 | 100 | 30 | 60 | 66,67 |
| 7.01.05.2.0 1.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah tema rapat koordinasi Forkompimcam | Tema | 6 | 15 | 2 | 2 | 100 | 2 | 19 | 316,67 |
| | | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Dokumen | 6 | 15 | 2 | 2 | 100 | 2 | 19 | 316,67 |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | % | 233,33 | 73,33 | 80 | 80 | 100,00 | 80 | 233,33 | 100,00 |
| 7.01.06.2.0 1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|---|---|-------------------|---|--|---|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| | Keluaran Kegiatan | Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik | Desa | 40 | 10 | 15 | 15 | 100 | 15 | 40 | 100 |
| | | Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun | Dokumen | 331 | 110 | 111 | 111 | 100 | 110 | 331 | 100 |
| | Hasil Kegiatan | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan | % | 235 | 75 | 80 | 80 | 100 | 80 | 235 | 100 |
| | | Persentase dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun | % | 235 | 75 | 80 | 80 | 100 | 80 | 235 | 100 |
| 7.01.06.2.0 1.01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah desa yang fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan | Desa/ kegiatan | 15/6 | 15/2 | 15/2 | 15/2 | 100 | 15/2 | 15/6 | 100 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|--|--|-------------------|---|---|--|--|--------------------------|---|---|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Dokumen | 45 | 15 | 15 | 15 | 100 | 15 | 45 | 100 |
| 7.01.06.2.0 1.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa | Desa/ kegiatan | 15/3 | 15/1 | 15/1 | 15/1 | 100 | 15/1 | 15/3 | 100 |
| | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 45 | 15 | 15 | 15 | 100 | 15 | 45 | 100 |
| 7.01.06.2.0 1.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan | Desa/ kegiatan | 15/6 | 15/2 | 15/2 | 15/2 | 100 | 15/2 | 15/6 | 100 |
| | | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 45 | 15 | 15 | 15 | 100 | 15 | 45 | 100 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|---|--|-----------------|---|--|---|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| 7.01.06.2.0 1.05 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Orang/ kegiatan | 45/6 | 45/2 | 45/2 | 45/2 | 100 | 45/2 | 45/6 | 100 |
| | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Dokumen | 45 | 15 | 15 | 15 | 100 | 15 | 45 | 100 |
| 7.01.06.2.0 1.06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah fasilitasi pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan | Desa | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 50 |
| | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Dokumen | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 50 |
| 7.01.06.2.0 1.07 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Orang/ kegiatan | 30/3 | 30/1 | 30/1 | 30/1 | 100 | 30/1 | 30/3 | 100 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|---|---|-------------------|---|---|--|--|--------------------------|---|---|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Dokumen | 45 | 15 | 15 | 15 | 100 | 15 | 45 | 100 |
| 7.01.06.2.0 1.08 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan | Surat | 12 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 12 | 100 |
| | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Dokumen | 12 | 4 | 4 | 4 | 100 | 4 | 12 | 100 |
| 7.01.06.2.0 1.09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes) | Desa/ kegiatan | 15/6 | 15/2 | 15/2 | 15/2 | 100 | 15/2 | 15/6 | 100 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|---------------------|--|---|--------------------|---|---|--|--|--------------------------|---|---|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| | | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Dokumen | 45 | 15 | 15 | 15 | 100 | 15 | 45 | 100 |
| 7.01.06.2.0 1.13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa | Desa/ kegiatan | 15/6 | 15/2 | 15/2 | 15/2 | 100 | 15/2 | 15/6 | 100 |
| | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Dokumen | 45 | 15 | 15 | 15 | 100 | 15 | 45 | 100 |
| 7.01.06.2.0 1.16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa | Orang/ kegiatan | 60/3 | 60/1 | 60/1 | 60/1 | 100 | 60/1 | 60/3 | 100 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021 - 2023) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja PD Tahun 2023) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023 | |
|------|--|--|----------------|---|---|--|--|--------------------------|---|---|--|
| | | | | | | Target Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Renja PD Tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6*100%) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4*100%) |
| | | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Dokumen | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 100 |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan program organisasi. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Watukumpul Tahun 2022 dan 2023 serta proyeksi Tahun 2024 dan 2025, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Watukumpul

| No. | Indikator | Satuan | SPM | IKU | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Penting |
|-----|--|--------|-----|-----|-----|---------------------------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|----------|-------|-----------------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan | Indeks | | √ | | 84 | 86 | 88 | 90 | 90,21 | 92,40 | 88 | 90 | |
| 2. | Cakupan layanan kecamatan | % | | √ | | 94,67 | 94,67 | 96,00 | 96,00 | 94,67 | 94,67 | 96,00 | 96,00 | |
| 3. | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | | | | 35,82 | 36,32 | 36,82 | 37,32 | 39,53 | 0 | 36,82 | 37,32 | |
| 4. | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Indeks | - | | - | 35,30 | 35,80 | 36,30 | 36,80 | 48,40 | 59,05 | 36,30 | 36,80 | |
| 5. | Persentase pelayanan publik yang tersedia | % | | | | 93,33 | 93,33 | 93,33 | 93,33 | 93,33 | 93,33 | 93,33 | 93,33 | |
| 6. | Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7. | Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 8. | Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7. | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | % | - | - | - | 80 | 80 | 86,67 | 86,67 | 80 | 80 | 86,67 | 86,67 | |

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Watukumpul

Kecamatan Watukumpul adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Evaluasi penilaian kinerja Kecamatan Watukumpul berdasar Renstra tahun 2021-2026 dapat dilihat dari :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat
- b. Cakupan layanan kecamatan
- c. Nilai SAKIP
- d. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
- e. Persentase pelayanan publik yang tersedia
- f. Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif
- g. Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan
- h. Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani
- i. Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik

Pada tahun 2022, IKM Kecamatan Watukumpul sebesar 90,21 dimana angka tersebut masuk dalam kategori baik, sehingga perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan mutu pelayanan di Kecamatan Watukumpul. Adapun pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Watukumpul meliputi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, penanganan gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan, penanganan potensi konflik tingkat desa dan kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Pada tahun 2022, cakupan layanan Kecamatan Watukumpul tersebut mencapai 94,67% dimana indikator yang masih perlu mendapat perhatian adalah persentase desa bertata kelola pemerintahan baik.

Pelayanan publik yang disediakan oleh Kecamatan Watukumpul meliputi publikasi data pemerintahan, penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Untuk data pemerintahan, semua data yang tersedia sudah terpublikasi 100% melalui aplikasi Monografi Kecamatan. Untuk penanganan pengaduan masyarakat dapat terselesaikan 100% dari seluruh total pengaduan yang ada. Sedangkan untuk pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat baru terlaksana 21 kewenangan dari total 35 kewenangan yang dilimpahkan atau sebesar 60%, hal ini disebabkan keterbatasan personil Kecamatan untuk mengampu baik secara jumlah maupun kompetensi dan tidak adanya pendampingan dari OPD terkait.

Capaian persentase masyarakat desa yang aktif sebesar 100% namun masih perlu didorong partisipasi masyarakat desa dan lembaga masyarakat pada pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Meskipun indikator persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan dan persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani masing-masing tercapai 100% tetap harus ditingkatkan kinerjanya karena masih ada gangguan trantibum dan potensi konflik yang terjadi di Kecamatan Watukumpul. Sedangkan untuk indikator persentase desa bertata kelola pemerintahan baik baru tercapai 80 % yaitu sebanyak 12 desa dari 15 desa di Kecamatan Watukumpul. Hal ini disebabkan masih ada desa yang belum menyusun perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban tepat waktu sesuai ketentuan. Sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intens dari Kecamatan Watukumpul.

Untuk indikator kesekretariatan terdiri dari nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Pada tahun 2022, Kecamatan Watukumpul mendapat nilai SAKIP sebesar 48,40 dan IRB sebesar 39,53 sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkannya. Adapun hal-hal yang menjadi tantangan untuk meningkatkan nilai SAKIP dan IRB adalah :

- a. Perlu ada *reward* dan *punishment* sebagai stimulant SDM Kecamatan Watukumpul untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya;
- b. Menjadikan hasil SAKIP dan IRB sebagai rekomendasi perbaikan program, kegiatan dan sub kegiatan internal ;
- c. Menjadikan pengendalian dan evaluasi internal sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, Kecamatan Watukumpul perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Kecamatan Watukumpul untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Kecamatan Watukumpul yaitu:

- a. Kebutuhan pegawai yang belum tercukupi
- b. Kondisi geografis alam yang berbukitan dan banyak daerah potensi bencana longsor dan akses jalan yang masih sulit serta terdapat daerah-daerah yang *blank signal*
- c. Sarana prasarana penunjang kegiatan yang belum memadai
- d. Perlunya penambahan ketinggian bangunan pada rumah dinas

Berdasarkan permasalahan tersebut, Kecamatan Watukumpul juga memiliki hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
- c. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
- d. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
- e. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan
- f. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran
- g. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan

Dalam menjawab permasalahan, faktor penghambat dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Watukumpul justru harus dipandang sebagai tantangan dalam menjalankan fungsinya dengan mengoptimalkan segala kelebihan dan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2022 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Adil

Adil merupakan keadaan/kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Makmur

Makmur merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

Agamis

Agamis merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.

Ngangeni

Ngangeni merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. *“Pemalang itu ngangeni”*.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

- a. Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- c. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong-royong;
- d. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
- e. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
- f. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan 4 (empat) program unggulan, yaitu :

- a. Desa Wisata (Dewi)

Merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki masing-masing desa. Adapun variannya sangat luas mencakup wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan dengan menampung kreatifitas dan inovasi masyarakat.

- b. Desa Sinergi (Desi)

Merupakan upaya peningkatan sinergitas antar desa, antara pemerintah desa dengan kecamatan dan kabupaten khususnya kolaborasi dan sinergitas penyelenggaraan program pemerintah dan pemerintah daerah yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat sehingga lebih meningkatkan akurasi capaiannya.

- c. Desa Digital (Dedi)

Merupakan upaya peningkatan transformasi digital di tingkat desa dalam pelayanan informasi kepada masyarakat dan peningkatan administrasi desa secara digital, beserta peningkatan kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

- d. Kota Industri (Koin)

Merupakan upaya peningkatan investasi perindustrian sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah, dilakukan dengan penguatan kawasan peruntukan industri yang diarahkan berkembang menjadi kawasan industri beserta kemudahan dalam informasi, pelayanan perijinan dan pemberian insentif.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, Kecamatan Watukumpul mendukung misi kedua yaitu “mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” yang dicapai melalui tujuan daerah berupa mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam mencapai reformasi birokrasi yang efektif dan efisien ditentukan sasaran daerah berupa meningkatnya pelayanan publik yang prima dengan indikator kinerja rata-rata indeks kepuasan masyarakat. Sedangkan berkaitan dengan program unggulan Kabupaten Pemalang, maka Kecamatan Watukumpul mendukung program

unggulan Desa Wisata (Dewi), Desa Sinergi (Desi) dan Desa Digital (Dedi). Dukungan terhadap Dewi, Desi dan Dedi diwujudkan dengan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 adalah **“Mempercepat Transportasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dan prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 adalah **“Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata, Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”**, maka kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2024, diarahkan pada **“Peningkatan Kemandirian Masyarakat yang Bertumpu pada Penguatan Ekonomi Kearifan Lokal dan SDM yang Berdaya Saing Didukung dengan Infrastruktur yang Merata”**, dengan prioritas pembangunan meliputi :

- a. Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas;
- b. Fasilitasi kemandirian desa dalam mewujudkan desa sinergi;
- c. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam penataan kota;
- d. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;
- e. Penanganan kemiskinan dengan pemberian jaminan sosial, perlindungan dan rehab sosial serta peningkatan keterampilan pada penduduk miskin yang terdampak covid.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Watukumpul tahun 2024, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Watukumpul adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Watukumpul adalah sebagai berikut:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari PD terkait (Bagian Organisasi, Inspektorat dan Bappeda);
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Kecamatan Watukumpul mendukung prioritas pembangunan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan system perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah, yaitu dengan meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima.

Hal-hal yang mempengaruhi dalam penentuan kebijakan Unsur Kewilayahan yang dilaksanakan Kecamatan Watukumpul adalah :

1. Dampak global dari pandemi Covid 19 yang menyebabkan memburuknya kondisi sosial ekonomi masyarakat dan penurunan pendapatan mengakibatkan potensi menurunnya kinerja tahun 2024.
2. Terbitnya peraturan baru terkait perencanaan penganggaran :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan pada nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan system e-planning dan e-budgeting.

3. Terbitnya peraturan baru terkait Kecamatan :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
 - Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
 - Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang

Hal tersebut mengakibatkan bertambahnya tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh Kecamatan Watukumpul.

Dalam rangka menghadapi dinamika tersebut, maka hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Watukumpul ke depan adalah :

1. Membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara kabupaten, kecamatan, hingga desa sehingga sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan kewenangan masing-masing;
2. Membangun kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder terkait seperti perangkat daerah kabupaten, instansi vertikal tingkat kecamatan dan masyarakat dalam rangka penjaringan masalah dan masukan serta inspirasi kreatif dalam rangka menyusun rencana pembangunan ke depan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pelayanan utamanya yang merupakan pelimpahan kewenangan;
4. Meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

Kecamatan Watukumpul dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja Kecamatan Watukumpul. Renja Kecamatan Watukumpul disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif Kecamatan Watukumpul dengan mempertimbangkan faktor 5M yaitu *Man* (Manusia), *Money* (Dana), *Machine* (Sarpras), *Methode* (Tupoksi dan Tata Laksana), dan *Matrial* (Bahan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam matrik rancangan awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2024 perlu disesuaikan dengan tupoksi dan kebutuhan Kecamatan Watukumpul.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2024

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|---------------------------------------|--|----------------|----------------|---|---------------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | |
| | KECAMATAN WATUKUMPUL | | | | 2,437,120,900 | KECAMATAN WATUKUMPUL | | | | 2,437,120,900 | |
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | 36,30 skor | 1.104.982.400 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | 36,30 skor | 1.104.982.400 | |
| | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | IRB | 36,82 skor | 397.861.500 | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | IRB | 36,82 skor | 397.861.500 | |
| 1) | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 2 Dokumen | 2,500,000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 2 Dokumen | 2,500,000 | |
| 2) | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2.500,000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2.500,000 | |

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|---------------------------------------|--|------------------|----------------------|---|---------------------------------------|--|------------------|----------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3) | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2.500.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2.500.000 | |
| 4) | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.500.000 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.500.000 | |
| 5) | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.500.000 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2.500.000 | |
| 6) | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 4 Laporan | 2.500.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 4 Laporan | 2.500.000 | |
| 7) | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 2.500.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 2.500.000 | |
| 2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | <i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun</i> | <i>6 laporan</i> | 1,689,620,900 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | <i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun</i> | <i>6 laporan</i> | 1,689,620,900 | |

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|---------------------------------------|--|-------------------|----------------|---|---------------------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1) | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 14 Orang/14 Bulan | 1.687.120.900 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 14 Orang/14 Bulan | 1.687.120.900 | |
| 2) | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 1 Laporan | 2.500.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 1 Laporan | 2.500.000 | |
| 3) | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | - | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 4 Laporan | - | |
| 3. | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | | <i>Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun</i> | 3 Dokumen | 0 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | | <i>Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun</i> | 3 Dokumen | 0 | |
| 1) | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 0 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 0 | |
| 2) | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | 0 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan | 0 | |
| 4. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | <i>Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas</i> | 28 Orang | 0 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | <i>Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas</i> | 28 Orang | 0 | |

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|---------------------------------------|--|----------------|-------------------|--|---------------------------------------|--|----------------|-------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1) | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | 14 Orang | 0 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | 14 Orang | 0 | |
| 2) | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undang | 14 Orang | 0 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undang | 14 Orang | 0 | |
| 5. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | <i>Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersedia</i> | 30 Dokumen | 77.682.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | <i>Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersedia</i> | 30 Dokumen | 77.682.000 | |
| 1) | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 4 Paket | 4.649.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 4 Paket | 4.649.000 | |
| 2) | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 12 Paket | 18.889.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 12 Paket | 18.889.000 | |
| 3) | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 2 Paket | 4.406.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 2 Paket | 4.406.000 | |
| 4) | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 12 Laporan | 49.738.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 12 Laporan | 49.738.000 | |

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|---------------------------------------|--|----------------|--------------------|---|---------------------------------------|--|----------------|--------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | <i>Jumlah barang milik daerah yang tersedia</i> | 6 Unit | 0 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | <i>Jumlah barang milik daerah yang tersedia</i> | 6 Unit | 0 | |
| 1) | Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | 1 Unit | 0 | Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | 1 Unit | 0 | |
| 2) | Pengadaan Mebel | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah paket mebel yang disediakan | 1 Paket | 0 | Pengadaan Mebel | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah paket mebel yang disediakan | 1 Paket | 0 | |
| 3) | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 unit | 0 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 unit | 0 | |
| 7. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | <i>Jumlah laporan penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia</i> | 72 Laporan | 199.297.500 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | <i>Jumlah laporan penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia</i> | 72 Laporan | 199.297.500 | |
| 1) | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 12 Laporan | 6.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 12 Laporan | 6.000.000 | |
| 2) | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 36 Laporan | 22.500.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 36 Laporan | 22.500.000 | |

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|---------------------------------------|--|----------------|--------------------|--|---------------------------------------|--|----------------|--------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3) | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 12 Laporan | 4.615.500 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 12 Laporan | 4.615.500 | |
| 4) | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 12 Laporan | 166.182.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 12 Laporan | 166.182.000 | |
| 8. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | <i>Jumlah barang milik daerah yang terpelihara</i> | <i>31 Unit</i> | 120.882.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | <i>Jumlah barang milik daerah yang terpelihara</i> | <i>31 Unit</i> | 120.882.000 | |
| 1) | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 13 unit | 47.480.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 13 unit | 47.480.000 | |
| 2) | Pemeliharaan Mebel | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah mebel yang dipelihara | 2 unit | 5.000.000 | Pemeliharaan Mebel | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah mebel yang dipelihara | 2 unit | 5.000.000 | |
| 3) | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 13 unit | 15.830.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 13 unit | 15.830.000 | |
| 4) | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 3 unit | 52.572.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 3 unit | 52.572.000 | |

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|---------------------------------------|--|----------------|-------------------|---|---------------------------------------|--|----------------|-------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| II. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | Persentase pelayanan publik yang tersedia | 93,33% | 41.000.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | Persentase pelayanan publik yang tersedia | 93,33% | 41.000.000 | |
| 1. | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | <i>Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun</i> | 1 Dokumen | 10.000.000 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | <i>Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun</i> | 1 Dokumen | 10.000.000 | |
| 1) | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | 10.000.000 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan | 1 Dokumen | 10.000.000 | |
| 2. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | <i>Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun</i> | 8 Dokumen | 16.000.000 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | <i>Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun</i> | 8 Dokumen | 16.000.000 | |
| 1) | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan | 2 Dokumen | 6.000.000 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan | 2 Dokumen | 6.000.000 | |
| 2) | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan | 2 Laporan | 5.000.000 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan | 2 Laporan | 5.000.000 | |

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|------|--|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3) | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan | 4 Laporan | 5.000.000 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan | 4 Laporan | 5.000.000 | |
| 3. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | <i>Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</i> | 605 Dokumen | 15.000.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | <i>Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</i> | 605 Dokumen | 15.000.000 | |
| 1) | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan | 600 Dokumen | 5.000.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan | 600 Dokumen | 5.000.000 | |
| 2) | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 1 Laporan | 10.000.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 1 Laporan | 10.000.000 | |
| 3) | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan | 4 Laporan | 0 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan | 4 Laporan | 0 | |
| III. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif | 100 persen | 68.500.000 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif | 100 persen | 68.500.000 | |
| 1. | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | <i>Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun</i> | 6 Dokumen | 68.500.000 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | <i>Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun</i> | 6 Dokumen | 68.500.000 | |

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|------------|--|---------------------------------------|---|---------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|---|---------------------------|-------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1) | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 15 lembaga kemasyarakatan | 0 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 15 lembaga kemasyarakatan | 0 | |
| 2) | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan | 1 Dokumen | 38.500.000 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan | 1 Dokumen | 38.500.000 | |
| 3) | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan | 4 Laporan | 30.000.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan | 4 Laporan | 30.000.000 | |
| IV. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan | 100 persen | 40.000.000 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan | 100 persen | 40.000.000 | |
| 1. | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | <i>Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun</i> | 1 Laporan | 20.000.000 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | <i>Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun</i> | 1 Laporan | 20.000.000 | |
| 1) | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 20.000.000 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 20.000.000 | |

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----------|--|---------------------------------------|--|------------------|-------------------|--|---------------------------------------|--|------------------|-------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2. | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | <i>Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun</i> | <i>2 Laporan</i> | 20.000.000 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | <i>Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang tersusun</i> | <i>2 Laporan</i> | 20.000.000 | |
| 1) | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah laporan hasil koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2 Laporan | 20.000.000 | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah laporan hasil koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 2 Laporan | 20.000.000 | |
| V. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani | 100 persen | 40.832.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani | 100 persen | 40.832.000 | |
| 1. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | <i>Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun</i> | <i>8 Dokumen</i> | 40.832.000 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | <i>Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun</i> | <i>8 Dokumen</i> | 40.832.000 | |
| 1) | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan | 30 orang | 25.832.000 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan | 30 orang | 25.832.000 | |

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|------------|--|---------------------------------------|--|----------------|--------------------|--|---------------------------------------|--|----------------|--------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2) | Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | |
| 3) | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 30 orang | 5.000.000 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 30 orang | 5.000.000 | |
| 4) | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | 4 laporan | 0 | Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | 4 laporan | 0 | |
| 4) | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 2 Dokumen | 10.000.000 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 2 Dokumen | 10.000.000 | |
| VI. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | 86,67 persen | 141.806.500 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | 86,67 persen | 141.806.500 | |
| 1. | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | <i>Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun</i> | 121 Dokumen | 141.806.500 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | <i>Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun</i> | 121 Dokumen | 141.806.500 | |
| 1) | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 15 Dokumen | 15.214.500 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 15 Dokumen | 15.214.500 | |

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|---------------------------------------|---|----------------|----------------|--|---------------------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2) | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa | 15 Dokumen | 10.482.000 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa | 15 Dokumen | 10.482.000 | |
| 3) | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | 15 Dokumen | 35.800.000 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | 15 Dokumen | 35.800.000 | |
| 4) | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 15 Dokumen | 10.000.000 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 15 Dokumen | 10.000.000 | |
| 5) | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 11 Dokumen | 15.000.000 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 11 Dokumen | 15.000.000 | |
| 6) | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 15 Dokumen | 10.000.000 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 15 Dokumen | 10.000.000 | |
| 7) | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa | 4 Dokumen | 5.000.000 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa | 4 Dokumen | 5.000.000 | |
| 8) | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | 15 Dokumen | 20.310.000 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | 15 Dokumen | 20.310.000 | |

| No | Rancangan awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|---------------------------------------|---|----------------|----------------|--|---------------------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9) | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif | 15 Dokumen | 10.000.000 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif | 15 Dokumen | 10.000.000 | |
| 10) | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa | 1 Dokumen | 10.000.000 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Kab. Pemalang, Watukumpul, Semua Desa | Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa | 1 Dokumen | 10.000.000 | |

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismenya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*. Mekanisme secara *top down* yaitu melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottom up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum PD dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan reses.

Untuk tahun 2024 ada program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Watukumpul yang merupakan usulan dari masyarakat.

Tabel 2.4
Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat Tahun 2024

| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan (Ranking) |
|-----|--|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| A. | Kegiatan Fisik Infrastruktur | | | | |
| 1. | Pengaspalan Jalan Dusun Jaha Bangsal Rt 17, 18, 20 Rw 04 Desa Tundagan ke Desa Klesem Kec. Kandang Serang (Kab.Pekalongan) | Desa Tundagan Kec.Watukumpul | Meningkatnya transportasi | 1023 M x 3 M | 2 |
| 2. | Pengaspalan Desa Bentus-Tlagasana Dusun Krajan Rt 02 Rw 08 | Desa Cikadu Kec.Watukumpul | Meningkatnya transportasi | 478 M x 4 M | 3 |
| 3. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Dusun Sipedang Rt 019 Rw 001 Desa Cawet | Desa Cawet, Kec.Watukumpul | Meningkatnya transportasi | 1 Paket | 1 |
| 4. | Pembangunan Jalan Rabat Beton Tlagasana-Gembong Dusun Tlaga Rt 07 Rw 03 | Desa Tlagasana, Kec.Watukumpul | Meningkatnya transportasi | 391 M x 2,3 M x 0,15 M | 4 |
| 5. | Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Desa Bodas Rt 11 Rw 03 | Desa Bodas, Kec.Watukumpul | Meningkatnya transportasi | 248 M x 0,15 M x 2,5 M | 5 |
| B. | Kegiatan Non Fisik | | | | |
| 1. | Pelatihan Anyaman Bambu | Desa Bodas, Kec.Watukumpul | Meningkatnya Produktivitas | 1 Paket | 1 |

| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan (Ranking) |
|----|---|---------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|
| 2. | Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak Silase | Desa Watukumpul, Kec.Watukumpul | Meningkatnya Produktivitas | 15 Orang | 2 |
| 3. | Pelatihan Pembuatan Parcel | Desa Tambi, Kec.Watukumpul | Meningkatnya Produktivitas | 15 Orang | 3 |
| 4. | Pelatihan Menjahit | Desa Wisnu, Kec.Watukumpul | Meningkatnya Produktivitas | 1 Paket | 4 |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN WATUKUMPUL

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Kecamatan Watukumpul Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Renja Kecamatan Watukumpul Tahun 2024 sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, dengan prioritas pembangunan 2024 pada:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhamkan dan transformasi pelayanan publik.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 yang merupakan tahun ketiga RPJMD, maka arah kebijakan pembangunan tersebut diarahkan pada **“Peningkatan Kemandirian Masyarakat yang Bertumpu pada Penguatan Ekonomi Kearifan Lokal dan SDM yang Berdaya Saing Didukung dengan Infrastruktur yang Merata”** dengan prioritas sebagai berikut:

1. Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas;
2. Fasilitasi kemandirian desa dalam mewujudkan desa sinergi;
3. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dalam penataan kota;
4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;
5. Penanganan kemiskinan dengan pemberian jaminan sosial, perlindungan dan rehab sosial serta peningkatan keterampilan pada penduduk miskin yang berdampak covid.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Watukumpul

Kecamatan Watukumpul dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu

untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Watukumpul harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Watukumpul secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

A. Tujuan

Tujuan Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2024 adalah “**Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima**”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Watukumpul sebagai PD yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman. Tujuan tersebut diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat.

B. Sasaran

Sasaran Renja yang akan dicapai oleh Kecamatan Watukumpul dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Watukumpul tahun 2024, adalah “**Meningkatnya pelayanan kecamatan**”. Sasaran tersebut diukur dengan indikator cakupan layanan kecamatan yang diperoleh dari rerata persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan *trantibum* tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang dapat diselesaikan, persentase potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik.;

Rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Watukumpul tahun 2024 dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Watukumpul Tahun 2024

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran | Satuan | Target |
|-----|---|----------------------------------|---|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima | | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan | Indeks | 88,00 |
| 2. | | Meningkatnya pelayanan kecamatan | Cakupan layanan kecamatan | % | 96,00 |

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Pada tahun 2024, Kecamatan Watukumpul merencanakan sebanyak 6 program, 13 kegiatan dan 44 sub kegiatan yang pelaksanaannya mencakup di seluruh wilayah Kecamatan Watukumpul dengan kebutuhan dana sebesar Rp 2.437.120.900,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Terdapat beberapa perbedaan jenis kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif rumusan Renja dibandingkan dengan rancangan RKPD, hal ini disebabkan adanya penyesuaian dengan kebutuhan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN WATUKUMPUL

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tahun 2024. Berikut program, kegiatan dan sub Kegiatan Kecamatan Watukumpul yang akan dilaksanakan pada tahun 2024:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah
 - c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - f. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

- g. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- h. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- i. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
- j. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Watukumpul Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

| Kode | Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | | | | |
|------|---|--------------------|----------------------|----------------|--|--|---|---|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|--|--|------------|-----------|
| | | Capaian Program | Keluaran SubKegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu indikatif (Rp) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) | | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | | | | | | 2.437.120.900 | | | | | 2.709.891.500 | | |
| 7 | 01 | 01 | | | | | | | | 2.104.982.400 | | | | | 2.512.716.000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | | | | | 17.500.000 | | | | | 10.140.000 | | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan | Kecamatan Watukumpul | 36,30 skor | 2 dokumen | 100 % | 2.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | 36,80 skor | 2.000.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan | Kecamatan Watukumpul | 36,30 Skor | 1 Dokumen | 100 % | 2.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | 36,80 Skor | 1.355.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan | Kecamatan Watukumpul | 36,30 Skor | 1 Dokumen | 100 % | 2.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | 36,80 Skor | 1.355.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan | Kecamatan Watukumpul | 36,30 Skor | 1 Dokumen | 100 % | 2.500.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | 36,80 Skor | 1.355.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.01 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi | Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat | Kecamatan Watukumpul | 36,30 Skor | 1 Dokumen | 100 % | 2.500.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi | 36,80 Skor | 1.355.000 |

| Kode | Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | | | |
|----------|---|--------------------|--|---|---|--|--|---|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|--|------------|---------------|
| | | Capaian Program | Keluaran SubKegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) | | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | Pemerintah (SAKIP) | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan | | | | | | | | Pemerintah (SAKIP) | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.01 | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan | Kecamatan Watukumpul | 36,30 Skor | 4 Laporan | 100 % | 2.500.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | 36,80 Skor | 1.355.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan | Kecamatan Watukumpul | 36,30 Skor | 4 Laporan | 100 % | 2.500.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | 36,80 Skor | 2.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | 1.689.620.900 | | | | 2.122.336.000 | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel | Kecamatan Watukumpul | 36,30 Skor | 14 Orang/14 Bulan | 100% | 1.687.120.900 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | 36,80 Skor | 2.120.336.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel | Kecamatan Watukumpul | 36,30 Skor | 1 Laporan | 100% | 2.500.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | 36,80 Skor | 1.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel | Kecamatan Watukumpul | 36,30 Skor | 4 Laporan | 100% | - | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | 36,80 Skor | 1.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | | | | | | - | | | | 1.355.000 | | |

| Kode | Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | | | | |
|----------|---|-------------------|----------------------|----------------|---|--|--|--|----------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------|--|------------|------------|
| | | Capaian Program | Keluaran SubKegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) | | | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.03 | 1 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) | Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD | Persentase dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai ketentuan | Kecamatan Watukumpul | 36,30 Skor | 1 Dokumen | 100% | - | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) | 36,80 Skor | 755.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.03 | 12 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) | Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD | Persentase dokumen administrasi barang milik daerah yang sesuai ketentuan | Kecamatan Watukumpul | 36,30 Skor | 2 Laporan | 100% | - | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) | 36,80 Skor | 600.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | - | | | | 2.000.000 | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | IRB | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | Persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya | Kecamatan Watukumpul | 36,82 Skor | 14 Orang | 100% | - | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | IRB | 37,32 Skor | 750.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan | IRB | Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undang | Persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya | Kecamatan Watukumpul | 36,82 Skor | 14 Orang | 100% | - | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | IRB | 37,32 Skor | 1.250.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | 77.682.000 | | | | 72.000.000 | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | IRB | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas | Kecamatan Watukumpul | 36,82 Skor | 4 Paket | 100% | 4.649.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | IRB | 37,32 Skor | 5.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | IRB | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas | Kecamatan Watukumpul | 36,82 Skor | 12 Paket | 100% | 18.889.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | IRB | 37,32 Skor | 35.000.000 |

| Kode | Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | | | | |
|----------|---|-------------------|----------------------|----------------|---|------------------------|---|---|----------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|--|-----|------------|--------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran SubKegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) | | | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | IRB | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas | Kecamatan Watukumpul | 36,82 Skor | 2 Paket | 100% | 4.406.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | IRB | 37,32 Skor | 4.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.06 | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | IRB | Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase ketersediaan paket administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas | Kecamatan Watukumpul | 36,82 Skor | 12 Laporan | 100% | 49.738.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | IRB | 37,32 Skor | 28.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | - | | | | | | | 62.250.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | 2 | Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan | IRB | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan | Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas | Kecamatan Watukumpul | 36,82 Skor | 1 Unit | 100% | 0 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | IRB | 37,32 Skor | 30.250.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | 5 | Pengadaan Mebel | IRB | Jumlah paket mebel yang disediakan | Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas | Kecamatan Watukumpul | 36,82 Skor | 1 Paket | 100% | 0 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | IRB | 37,32 Skor | 2.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.07 | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | IRB | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas | Kecamatan Watukumpul | 36,82 Skor | 4 unit | 100% | 0 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | IRB | 37,32 Skor | 30.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | 199.297.500 | | | | | | | 185.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | IRB | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat | Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas | Kecamatan Watukumpul | 36,82 skor | 12 Laporan | 100% | 6.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | IRB | 37,32 Skor | 6.000.000 |

| Kode | Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | | | |
|----------|---|-------------------|----------------------|----------------|---|------------------------|--|---|----------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----|-------------------|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran SubKegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) | | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | IRB | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas | Kecamatan Watukumpul | 36,82 skor | 36 Laporan | 100% | 22.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | IRB | 37,32 Skor | 21.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | IRB | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas | Kecamatan Watukumpul | 36,82 skor | 12 Laporan | 100% | 4.615.500 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | IRB | 37,32 Skor | 5.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | IRB | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas | Kecamatan Watukumpul | 36,82 skor | 12 Laporan | 100% | 166.182.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | IRB | 37,32 Skor | 153.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | 120.882.000 | | | | 57.000.000 | |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | IRB | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas | Kecamatan Watukumpul | 36,82 Skor | 13 unit | 100% | 47.480.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | IRB | 37,32 Skor | 30.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 5 | Pemeliharaan Mebel | IRB | Jumlah mebel yang dipelihara | Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas | Kecamatan Watukumpul | 36,82 Skor | 2 unit | 100% | 5.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | IRB | 37,32 Skor | 1.000.000 |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | IRB | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas | Kecamatan Watukumpul | 36,82 Skor | 13 unit | 100% | 15.830.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | IRB | 37,32 Skor | 6.000.000 |

| Kode | Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | | | |
|----------|---|-------------------|--|---|--|---|---|---|----------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---|-------------------|------------|
| | | Capaian Program | Keluaran SubKegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) | | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 7 | 1 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | IRB | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas | Kecamatan Watukumpul | 36,82 Skor | 3 unit | 100% | 52.572.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | IRB | 37,32 Skor | 20.000.000 |
| 7 | 1 | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | | | | | | | | 41.000.000 | | | 31.886.000 | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | 10.000.000 | | | 5.000.000 | |
| 7 | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase pelayanan publik yang tersedia | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase dokumen pemerintahan yang dipublikasi | Kecamatan Watukumpul | 93,33 % | 1 Dokumen | 100 % | 10.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase pelayanan publik yang tersedia | 93,33 % | 5.000.000 |
| 7 | 1 | 2 | 2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | | | | | | | | | 16.000.000 | | | 16.136.000 | |
| 7 | 1 | 2 | 2.02 | 1 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Persentase pelayanan publik yang tersedia | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Persentase dokumen pelayanan kepada masyarakat terselesaikan | Kecamatan Watukumpul | 93,33 % | 2 Dokumen | 100% | 6.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase pelayanan publik yang tersedia | 93,33 % | 6.136.000 |
| 7 | 1 | 2 | 2.02 | 2 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Persentase pelayanan publik yang tersedia | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Persentase dokumen pelayanan kepada masyarakat terselesaikan | Kecamatan Watukumpul | 93,33 % | 2 Laporan | 100% | 5.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase pelayanan publik yang tersedia | 93,33 % | 5.000.000 |
| 7 | 1 | 2 | 2.02 | 3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentase pelayanan publik yang tersedia | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentase dokumen pelayanan kepada masyarakat terselesaikan | Kecamatan Watukumpul | 93,33 % | 4 Laporan | 100% | 5.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase pelayanan publik yang tersedia | 93,33 % | 5.000.000 |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | | | | 15.000.000 | | | 10.750.000 | |

| Kode | Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | | | | |
|------|---|-------------------|----------------------|----------------|---|---|--|---|----------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------|--|---|-------------------|-----------|
| | | Capaian Program | Keluaran SubKegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) | | | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | 1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Persentase pelayanan publik yang tersedia | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | Persentase dokumen pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia | Kecamatan Watukumpul | 93,33 % | 600 Dokumen | 100% | 5.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase pelayanan publik yang tersedia | 93,33 % | 5.000.000 |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | 2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Persentase pelayanan publik yang tersedia | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | Persentase dokumen pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia | Kecamatan Watukumpul | 93,33 % | 1 Laporan | 100% | 5.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase pelayanan publik yang tersedia | 93,33 % | 5.000.000 |
| 7 | 1 | 2 | 2.04 | 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang di Limpahkan | Persentase pelayanan publik yang tersedia | Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan | Persentase dokumen pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia | Kecamatan Watukumpul | 93,33 % | 4 Laporan | 100% | 0 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase pelayanan publik yang tersedia | 93,33 % | 750.000 |
| 7 | 1 | 3 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | 68.500.000 | | | | | 43.250.000 | |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | | | | | 68.500.000 | | | | | 43.250.000 | |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Persentase kehadiran lembaga peserta Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan | Kecamatan Watukumpul | 100% | 15 lembaga kemasyarakatan | 100% | 0 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif | 100% | 5.250.000 |

| Kode | Urusan/ BidangUrusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | | | | |
|----------|---|--------------------|----------------------|----------------|---|--|---|--|---------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|------------|--|--|--|------|------------|
| | | Capaian Program | Keluaran SubKegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) | | | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | 2 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja danKegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Persentase kehadiran lembaga peserta Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan | Kecamatan Watukumpul | 100% | 1 Dokumen | 100% | 38.500.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif | 100% | 27.000.000 |
| 7 | 1 | 3 | 2.01 | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentase kehadiran lembaga peserta Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan | Kecamatan Watukumpul | 100% | 4 Laporan | 100% | 30.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif | 100% | 11.000.000 |
| 7 | 1 | 4 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | 40.000.000 | | | | 12.000.000 | | |
| 7 | 1 | 4 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | 20.000.000 | | | | 7.000.000 | | |
| 7 | 1 | 4 | 2.01 | 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Persentase Jenis laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang tersusun | Kecamatan Watukumpul | 100% | 1 Laporan | 100% | 20.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan | 100% | 7.000.000 |
| 7 | 1 | 4 | 2.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | 20.000.000 | | | | 5.000.000 | | |
| 7 | 1 | 4 | 2.02 | 1 | Koordinasi/Sinergidengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Persentase Perdadadan Perbup yang dikoordinasikan penegakkannya | Kecamatan Watukumpul | 100% | 2 Laporan | 100% | 20.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan | 100% | 5.000.000 |

| Kode | Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | | | | |
|------|---|-------------------|----------------------|----------------|---|---|---|--|----------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|--|--|-------|------------|
| | | Capaian Program | Keluaran SubKegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) | | | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 7 | 1 | 5 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | 23.000.000 | | | | |
| 7 | 1 | 5 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | | 23.000.000 | | | | |
| 7 | 1 | 5 | 2.01 | 1 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | Kecamatan Watukumpul | 100% | 30 orang | 100% | 25.832.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase potensi konflik tingkatdesa dan kecamatan yang tertangani | 100% | 12.000.000 |
| 7 | 1 | 5 | 2.01 | 2 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Persentase potensi konflik tingkatdesa dan kecamatan yang tertangani | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | Kecamatan Watukumpul | 100% | 30 orang | 100% | 5.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase potensi konflik tingkatdesa dan kecamatan yang tertangani | 100% | 5.000.000 |
| 7 | 1 | 5 | 2.01 | 5 | Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani | Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | Kecamatan Watukumpul | 100 % | 4 laporan | 100 % | 0 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase potensi konflik tingkatdesa dan kecamatan yang tertangani | 100 % | 1.000.000 |
| 7 | 1 | 5 | 2.01 | 8 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | Kecamatan Watukumpul | 100% | 2 Dokumen | 100% | 10.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase potensi konflik tingkatdesa dan kecamatan yang tertangani | 100% | 5.000.000 |

| Kode | Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | | | |
|------|---|-------------------|--|---|---|--|---|---|----------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| | | Capaian Program | Keluaran SubKegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) | | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 7 | 1 | 6 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | 141.806.500 | | | | | 87.039.500 | | |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | 141.806.500 | | | | 87.039.500 | | |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 1 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan | Kecamatan Watukumpul | 86,67 % | 15 Dokumen | 100% | 15.214.500 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | 86,67 % | 8.039.500 |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 2 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan | Kecamatan Watukumpul | 86,67 % | 15 Dokumen | 100% | 10.482.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | 86,67 % | 10.000.000 |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 3 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desadan Pendayagunaan Aset Desa | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan | Kecamatan Watukumpul | 86,67 % | 15 Dokumen | 100% | 35.800.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | 86,67 % | 26.000.000 |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 5 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan | Kecamatan Watukumpul | 86,67 % | 15 Dokumen | 100% | 10.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | 86,67 % | 10.000.000 |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 6 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun | Kecamatan Watukumpul | 86,67 % | 11 Dokumen | 100% | 15.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | 86,67 % | 0 |

| Kode | Urusan/ BidangUrusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2024 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|----------------------|----------------|---|--|--|---|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|--|--|--|----------------------|-----------|
| | | Capaian Program | Keluaran SubKegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu indikatif (Rp) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) | | | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 7 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan | Kecamatan Watukumpul | 86,67 % | 15 Dokumen | 100% | 10.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | 86,67 % | 7.000.000 |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 8 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan | Kecamatan Watukumpul | 86,67 % | 4 Dokumen | 100% | 5.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | 86,67 % | 7.000.000 |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 9 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah denganPembangunan Desa | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan | Kecamatan Watukumpul | 86,67 % | 15 Dokumen | 100% | 20.310.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | 86,67 % | 7.000.000 |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan | Kecamatan Watukumpul | 86,67 % | 15 Dokumen | 100% | 10.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | 86,67 % | 6.000.000 |
| 7 | 1 | 6 | 2.01 | 16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun berkenaan | Kecamatan Watukumpul | 86,67 % | 1 Dokumen | 100% | 10.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | 86,67 % | 6.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 2.437.120.900 | | | | | 2.709.891.500 | |

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2024 ini adalah :

1. Renja Kecamatan Watukumpul merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Watukumpul Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2024.
2. Renja Kecamatan Watukumpul memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih **indikatif** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran yang tersedia.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD-Renstra PD dan Renja Tahunan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Seksi dan seluruh staf Kecamatan Watukumpul secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Watukumpul Tahun 2024 agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan pada Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Watukumpul Tahun 2024 senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Kecamatan

Watukumpul Tahun 2024 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Kecamatan Watukumpul Tahun 2024.

Pemalang, Agustus 2023
CAMAT WATUKUMPUL



DEDI SARWOAJI, AP,M.H
Pembina Tk. I
NIP. 19741206 199311 1 001



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 050 / 156 / TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN WATUKUMPUL TAHUN 2024

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Strategis Kecamatan Watukumpul Tahun 2021 - 2026 melalui program dan kegiatan perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang ;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Watukumpul Tahun 2022 termasuk capaian kinerja dan kemajuannya;
 - b. mengkaji dan mengevaluasi capaian rencana strategis Kecamatan Watukumpul Tahun 2021-2026
 - c. menganalisa capaian kinerja pelayanan Kecamatan Watukumpul berdasarkan rencana kerja sebelumnya;
 - d. mengidentifikasi isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Watukumpul;
 - e. mengkaji rancangan awal RKPD, peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
 - f. melakukan diskusi untuk memperoleh masukan data yang diperlukan antar seksi sebagai bahan penyusunan;
 - g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait dalam proses penyusunan agar sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026;
 - h. menyusun Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul Tahun 2024.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 050 / 156 /TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN WATUKUMPUL TAHUN
2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN WATUKUMPUL
TAHUN 2024

| NO | KEDUDUKAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----------|---|----------------------------|-----------------------|
| 1. | Camat Watukumpul | Ketua | |
| 2. | Sekretaris Kecamatan Watukumpul | Sekretaris | |
| 3. | Kasubbag Bina Program dan Keuangan pada Sekretariat Kecamatan Watukumpul | Anggota | |
| 4. | Kepala Seksi Tata Pemerintahan | Anggota | |
| 5. | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa | Anggota | |
| 6. | Kepala Seksi dan Ketentraman Ketertiban Umum | Anggota | |
| 7. | Kepala Seksi Pelayanan | Anggota | |
| 8. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Kecamatan Watukumpul | Anggota | |
| 9. | Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa | Tim Teknis | Gigih Panuntun, S.ST |
| 10. | Pengelola Administrasi Pemerintahan Pada Seksi Tata Pemerintahan | Tim Teknis | Aola Dliyaul K., A.Md |
| 11. | Bendahara | Tim Teknis | Pujiyono, S.M |


BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,

MANSUR HIDAYAT

**TABEL PERSANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BESERTA TARGET KINERJA SESUAI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN
KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH**

KECAMATAN WATUKUMPUL

| Kode Rekening | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan Indikator lama | Target Lama | | | | | | | Kode Rekening (Pemutakhiran SIPD-RI) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran SIPD-RI) | Indikator Baru | Satuan Indikator Baru | Target Baru | | | | | | |
|-----------------|--|---|-----------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Target Akhir | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Target Akhir |
| 7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 35,52 | 35,82 | 36,32 | 36,82 | 37,32 | 37,82 | 37,82 | 7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 35,52 | 35,82 | 36,32 | 36,82 | 37,32 | 37,82 | 37,82 |
| | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai | 34,8 | 35,30 | 35,80 | 36,30 | 36,80 | 37,30 | 37,30 | | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai | 34,8 | 35,30 | 35,80 | 36,30 | 36,80 | 37,30 | 37,30 |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| | Keluaran Kegiatan | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Dokumen | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 76 | | Keluaran Kegiatan | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | Dokumen | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 92 |
| | Hasil Kegiatan | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Hasil Kegiatan | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun | Dokumen | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah DPA SKPD yang disusun | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 7.01.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Jumlah perubahan DPA-SKPD yang disusun | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |

| Kode Rekening | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan Indikator lama | Target Lama | | | | | | | Target Akhir | Kode Rekening (Pemutakhiran SIPD-RI) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran SIPD-RI) | Indikator Baru | Satuan Indikator Baru | Target Baru | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----------------------|-------------|------|------|------|------|------|-------|-------------------|---|--|----------------|-----------------------|-------------|------|------|------|------|--------------|--|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2021 | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Target Akhir | |
| 7.01.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 7.01.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | Keluaran Kegiatan | Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas | Orang | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 85 | | Keluaran Kegiatan | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun | Dokumen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| | Hasil Kegiatan | Persentase pegawai yang meningkat kapasitasnya | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Hasil Kegiatan | Persentase jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersusun | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang tersedia | stel | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Paket | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 7.01.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan | Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan | Orang/ kegiatan | 17/2 | 17/2 | 17/2 | 17/2 | 17/2 | 17/2 | 17/10 | 7.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | |
| 7.01.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang undangan | Orang/ kegiatan | 17/2 | 17/2 | 17/2 | 17/2 | 17/2 | 17/2 | 17/10 | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | |
| | Keluaran Kegiatan | Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia | Layanan | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | | Keluaran Kegiatan | Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun | Dokumen | 97 | 96 | 91 | 91 | 97 | 97 | 569 | |
| | Hasil Kegiatan | Persentase ketersediaan administrasi umum yang memperlancar pelaksanaan tugas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Hasil Kegiatan | Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | Jenis/ bulan | 4/12 | 4/12 | 4/12 | 4/12 | 4/12 | 4/12 | 4/60 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Unit | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | |

| Kode Rekening | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan Indikator lama | Target Lama | | | | | | | Kode Rekening (Pemutakhiran SIPD-RI) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran SIPD-RI) | Indikator Baru | Satuan Indikator Baru | Target Baru | | | | | | |
|-----------------|--|---|-----------------------|-------------|------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------|------|------|------|------|------|--------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Target Akhir | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Target Akhir |
| | Keluaran Kegiatan | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia | Jasa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | | Keluaran Kegiatan | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun | Laporan | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 432 |
| | Hasil Kegiatan | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Hasil Kegiatan | Persentase jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat dinas yang terkirim | Surat | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4000 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening jasa komunikasi,SDA dan listrik yang dibayar tiap bulan | Jenis/ bulan | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/60 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 216 |
| 7.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar | Jenis/ bulan | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 | 3/60 | 7.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan | Orang/ bulan | 9/12 | 9/12 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/60 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | |
| | Keluaran Kegiatan | Jumlah barang milik daerah yang terpelihara | Unit | 67 | 45 | 44 | 45 | 71 | 72 | 277 | | Keluaran Kegiatan | Jumlah barang milik daerah yang terpelihara | Unit | 67 | 45 | 44 | 45 | 71 | 72 | 344 |
| | Hasil Kegiatan | Persentase barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Hasil Kegiatan | Persentase barang milik daerah yang terpelihara | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang berijin dan terpelihara | Unit | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 95 | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 111 |
| 7.01.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah mebel yang terpelihara | Unit | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 140 | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Unit | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 180 |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara | Unit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara | Unit | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 |

| Kode Rekening | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan Indikator lama | Target Lama | | | | | | | Kode Rekening (Pemutakhiran SIPD-RI) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran SIPD-RI) | Indikator Baru | Satuan Indikator Baru | Target Baru | | | | | | |
|-----------------|--|---|-----------------------|-------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------------------------------|--|---|------------------------|-------------|------|------|------|------|------|--------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Target Akhir | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Target Akhir |
| | Keluaran Kegiatan | Jumlah peserta musyawarah perencanaan pembangunan | Orang | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 375 | | Keluaran Kegiatan | Jumlah dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun | Dokumen | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 39 |
| | Hasil Kegiatan | Persentase kehadiran musyawarah pembangunan (Desa/Kel+Kec) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Hasil Kegiatan | Persentase dokumen koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang tersusun | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.01.03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah peserta sosialisasi Musrenbang Desa/Kelurahan | Orang | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Lembaga kemasyarakatan | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 |
| 7.01.03.2.01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan | Orang | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 375 | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah kegiatan hasil Musrenbang kab yang didampingi | Desa/ kelurahan | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 27 |
| | | Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi | Lembaga | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7.01.04 | Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Prosentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | |
| | Keluaran Kegiatan | Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkatkan kapasitasnya | Orang | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 | | Keluaran Kegiatan | Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun | Laporan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |

| Kode Rekening | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan Indikator lama | Target Lama | | | | | | | Kode Rekening (Pemutakhiran SIPD-RI) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran SIPD-RI) | Indikator Baru | Satuan Indikator Baru | Target Baru | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------------------------------|---|---|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|----|-----|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Target Akhir | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Target Akhir | | |
| | Hasil Kegiatan | Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Hasil Kegiatan | Persentase dokumen penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 7.01.05.2.01.01 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang dilaksanakan | Dokumen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
| 7.01.05.2.01.02 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa | Orang | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Orang | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
| 7.01.05.2.01.05 | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan | Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan | Kasus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 7.01.05.2.01.0005 | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Laporan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 7.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah tema rapat koordinasi Forkompincam | Tema | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | % | 73,33 | 80,00 | 80,00 | 86,67 | 86,67 | 93,33 | 93,33 | 7.01.06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik | % | 73,33 | 80,00 | 80,00 | 86,67 | 86,67 | 93,33 | 93,33 | | |
| 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | |
| | Keluaran Kegiatan | Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik | Desa | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | Keluaran Kegiatan | Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun | Dokumen | 111 | 111 | 110 | 121 | 110 | 113 | 676 | | |


| Kode Rekening | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Lama | Satuan Indikator lama | Target Lama | | | | | | | Kode Rekening (Pemutakhiran SIPD-RI) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pemutakhiran SIPD-RI) | Indikator Baru | Satuan Indikator Baru | Target Baru | | | | | | |
|-----------------|--|--|-----------------------|-------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------|-------------|------|------|------|------|------|--------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Target Akhir | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Target Akhir |
| 7.01.06.2.01.13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa | Desa/ kegiatan | 15/2 | 15/2 | 15/2 | 15/2 | 15/2 | 15/2 | 15/10 | 7.01.06.2.01.0013 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Dokumen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 |
| 7.01.06.2.01.16 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa | Orang/ kegiatan | 60/1 | 60/1 | 60/1 | 60/1 | 60/1 | 60/1 | 60/5 | 7.01.06.2.01.0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |

Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota: Kec.Watukumpul Kab.Pemalang

| No | Jenis Kegiatan | Hasil Pengendalian dan Evaluasi | | | |
|-------|--|---------------------------------|-----------|----------------------------------|---|
| | | Kesesuaian | | Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
| | | Ada | Tidak Ada | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja. | √ | | | |
| 2. | Pengolahan data dan informasi. | √ | | | |
| 3. | Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota. | √ | | | |
| 4. | Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota. | √ | | | |
| 5. | Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota. | √ | | | |
| 6. | Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota. | √ | | | |
| 7. | Perumusan tujuan dan sasaran. | √ | | | |
| 8. | Penelaahan usulan masyarakat. | √ | | | |
| 9. | Perumusan kegiatan prioritas. | √ | | | |
| 10. | Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota. | √ | | | |
| 10.a. | Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan. | √ | | | |
| 10.b. | Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota. | √ | | | |
| 10.c. | Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan. | √ | | | |
| 10.d. | Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota. | √ | | | |

| No | Jenis Kegiatan | Hasil Pengendalian dan Evaluasi | | | |
|-----|---|---------------------------------|-----------|----------------------------------|---|
| | | Kesesuaian | | Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak |
| | | Ada | Tidak Ada | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 11. | Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu. | √ | | | |
| 12. | Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota. | √ | | | |
| 13. | Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju. | √ | | | |
| 14. | Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan. | √ | | | |


 Pematang Siantar, Agustus 2023
 CAMAT WATUKUMPUL
 DEDI SARWOAJI, AP., MH
 Pembina Tk.I
 NIP. 19741206 199311 1 001

Petunjuk Pengisian Formulir E.70:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WATUKUMPUL**

**BERITA ACARA FORUM PERANGKAT DAERAH RENCANA
KERJA (RENJA) KECAMATAN WATUKUMPUL TAHUN 2024**

Pada Hari ini Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan april tahun dua ribu dua puluh tiga telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul Tahun 2024 yang dihadiri oleh pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan Watukumpul.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan hal berikut :

1. Pemaparan materi Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Watukumpul Tahun 2024 yang disampaikan Camat Watukumpul (Dedi Sarwoaji, AP., MH);
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul Tahun 2024 sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan maka pada :

Hari dan tanggal : Kamis, 27 April 2023

Pukul : 09.00

Tempat : Pendopo Kecamatan Watukumpul

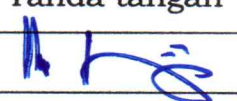
Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul Tahun 2024,

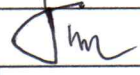

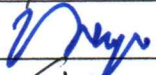



MENYEPAKATI :

Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul Tahun 2024 agar segera di tetapkan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul dilaksanakan dengan sebaik- baiknya agar Capaian Kinerjanya bisa tercapai.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan sebagaimana mestinya.

Watukumpul, 27 April 2023

| No | Nama | Perwakilan | Tanda tangan |
|----|------------------------|------------------|---|
| 1 | Dedi Sarwoaji, AP., MH | Camat Watukumpul |  |

| | | | |
|---|-----------------------|-------------------------------------|---|
| 2 | Edy | Kapolsek Watukumpul |  |
| 3 | Irwan Sofiyatudin | Danramil Watukumpul |  |
| 4 | Siti Wahyu Nikmah, SE | Sekcam Watukumpul |  |
| 5 | Sidik Nugroho | Kades Watukumpul |  |
| 6 | Kuswadi | Kades Majakerta |  |
| 7 | Joni | Koordinator TPKD Kec. Watukumpul |  |


CAMAT WATUKUMPUL

DEDI SARWOAJI, AP., MH
 Pembina Tk I
 NIP. 19741206 199311 1 001







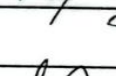


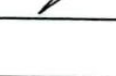

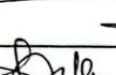

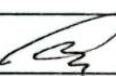
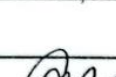


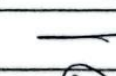


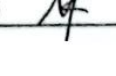




DAFTAR HADIR


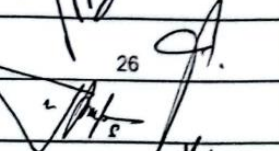
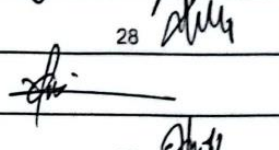
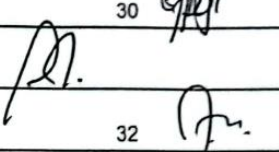
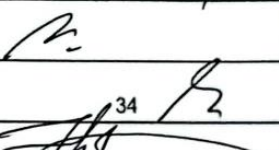
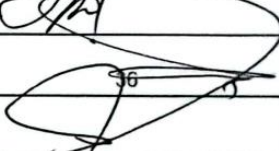


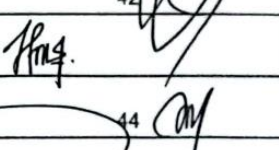
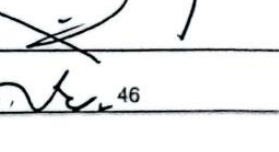
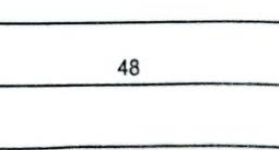
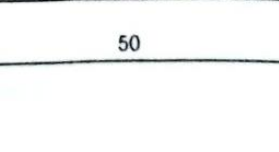



Hari : Kamis

Tanggal : 27 April 2023

Tempat : Pendopo Kecamatan Watukumpul

Acara : Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Watukumpul Tahun 2024

| NO | NAMA | INSTANSI | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|------------------|-------------------|---------------|--|
| 1 | ROJIKIN | KUK Watukumpul | KUK | 1  |
| 2 | ARIS G | WASC | WAS. TRAMITE | 2  |
| 3 | Rusmanfa | KB. Cawak | base Pem | 3  |
| 4 | Anggil A | ERI KANAWAU | Int. Ur. Lu | 4  |
| 5 | Damin | UPDI WL. J | Ka. UPDI I | 5  |
| 6 | Kary | P. d. g. ur. Wily | Kep. ur. ur | 6  |
| 7 | Siti Wahyu Nilam | Kec. | Sekretan | 7  |
| 8 | Stennet Kuntoro | PKKB | Korlap | 8  |
| 9 | Siti Widyasari | Kec | Kor. ohya | 9  |
| 10 | Sertu M. Tampuh | Koramil | Polres | 10  |
| 11 | ATTOM S | PEM WATUKUMPU | Watukumpul TV | 11  |
| 12 | Juni | TPDK | Kon. net. ur | 12  |
| 13 | Sidiq u. | Powder. | KADES. WITPL | 13  |
| 14 | Kuswadi | Majalento | Kades | 14  |
| 15 | Pusiyono | Becanatan | Bicanghar | 15  |
| 16 | Kusriyo | KADES. | Kodas | 16  |
| 17 | Wukir Sunardi | Prades | Bodas | 17  |
| 18 | Wibisono | Pmlu | Pwely | 18  |
| 19 | Indah B | DJ. WATUKUMPU | SEKRETIS | 19  |
| 20 | N. Braman | Ds. Mnggan | Kades | 20  |
| 21 | Dulu N | PKH | PA | 21  |
| 22 | Manan | PKH | PD | 22  |
| 23 | Nanik F | PKH | PD | 23  |

| NO | NAMA | INSTANSI | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|--------------|----------------|-------------|--|
| 24 | Caris | Fas | Kades |  24 |
| 25 | Fery S | BPP | Koordinator |  25 |
| 26 | Kusaeli | Bapenda | Pet. PBB |  26 |
| 27 | Bugiyatno | Bapenda | - - |  27 |
| 28 | Ty Agung N | PKH | |  28 |
| 29 | Ahik Yuliani | PKH | |  29 |
| 30 | Dewi. m | " | |  30 |
| 31 | M. Fajar A | - - | pendamping |  31 |
| 32 | Iwan. J | Koramil | Danramil |  32 |
| 33 | Muamir | P3MD | PHD |  33 |
| 34 | Nur Hafid R | P3MD | PHD |  34 |
| 35 | Damroni | PKH | pendamping |  35 |
| 36 | B. Suljaja | WISD | Kalor |  36 |
| 37 | Tasdiq | UKDU | Sebid |  37 |
| 38 | Rizki A | Mugelaman | Kam. |  38 |
| 39 | Taufik | CAWOT | KORAS | 39 |
| 40 | R. WOT-R | PKMS CIGADU | KALUS | 40 |
| 41 | H. Duren | KADES | CIGADU. | 41 |
| 42 | Ghaib Arif | PKH | PD | 42 |
| 43 | Kuswah | Kecamatan | Sat Transb | 43 |
| 44 | MUAF Hidayat | kecamatan | sat Umpeg | 44 |
| 45 | Eko Susanto | Perdes | Sebid | 45 |
| 46 | Ryan K. | PKH Utepe | | 46 |
| 47 | | | | 47 |
| 48 | | | | 48 |
| 49 | | | | 49 |
| 50 | | | | 50 |